

## **ABSTRAK**

### **PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM UPAYA MEDIASI PENYELESAIAN PIUTANG *SHARE HANDLING* ANTARA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DENGAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PELABUHAN PANJANG**

**Oleh**

**EDO EPRIANDI SITIO**

Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya jaksa sangat dikenal pada bagian hukum pidana, namun sangat jarang masyarakat mengenal jaksa yang bertugas pada bidang hukum lain seperti bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau sering disebut dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan JPN dalam melakukan mediasi pada sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan untuk memahami peran JPN dalam proses mediasi dan bagaimana pelaksanaan pembayaran penunggak dalam pembayaran *share handling*.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-

undangan serta studi kasus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Adapun bahan hukum yang diterapkan merupakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan teknik pengolahan analisis hukum deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini berupa batasan tugas dan wewenang JPN dalam upaya mediasi mengenai penyelesaian sengketa perdata wanprestasi tunggakan pembayaran *share handling* yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disesuaikan dengan PERJA Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan PERJA No.040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Tentang SOP Datun. Berdasarkan ketentuan tersebut JPN melakukan suatu pendekatan persuasif kepada Perusahaan Bongkar Muat yang menunggak.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah JPN harus berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata dan wajib menguasai ruang lingkup keuangan negara dan kekayaan negara berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai kekayaan negara yang dipisahkan maupun sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan guna mencegah adanya suatu kerugian keuangan negara. Kewenangan JPN dalam menyelesaikan sengketa perdata telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, menurut penulis diperlukan adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik perihal penyelesaian sengketa perdata mediasi supaya dalam asas kepastian hukum tercapai.

**Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Mediasi, Wanprestasi, *Share Handling*.**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF STATE PROSECUTORS (JPN) IN SETTLEMENT OF *SHARE HANDLING* BETWEEN THE SHARE HANDLING COMPANY AND PT. INDONESIA PORT II (PERSERO) LONG PORT BRANCH**

**By**

**EDO EPRIANDI SITIO**

In public life, in general, prosecutors are very well known in the criminal law section, but it is very rare for people to know prosecutors who work in other legal fields such as Civil and State Administration or often referred to as State Attorney Attorneys (JPN). The purpose of this paper is to determine the limitations of JPN's authority in mediating civil disputes in default of arrears in *share handling* based on the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 jo. Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and to understand the role of JPN in the mediation process and how to implement payments in arrears in *share handling*.

The method applied in this paper is a normative juridical and empirical juridical research using a statutory approach as well as a case study at the Bandar Lampung District Attorney. The legal materials that are applied are primary legal materials and secondary legal materials, then the data processing techniques use qualitative descriptive legal analysis processing techniques.

The results of this study are the limitations of the JPN's duties and powers in mediation efforts regarding the settlement of civil disputes in default of payment of *share handling* which have been regulated in Article 30 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 jo. Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, Presidential Regulation Number 38 of 2010 concerning Organization and Work Procedure of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia adjusted to PERJA Number Per-025/A/JA/11/2015 concerning Guidelines for Implementing Law Enforcement, Legal Aid, Legal Considerations, Other Legal Actions and Legal Services in the Civil and State Administration and PERJA No. 040/A/J/A/12/2010 jo. PERJA No.018/A/JA/07/2014 Regarding Datun SOP. Based on these provisions, JPN took a persuasive approach to the unloading companies in arrears.

The conclusion of this study is that JPN must be based on Article 1320 of the Civil Code and must control the scope of state finances and state assets based on applicable laws and regulations, both as separated state assets and as state assets that are not separated in order to prevent a state financial loss. JPN's authority in resolving civil disputes has been regulated in several laws and regulations. However, according to the author, it is necessary to have a law that specifically regulates the settlement of mediation civil disputes so that the principle of legal certainty is achieved.

**Keywords: State Attorney, Mediation, Default, *Share Handling*.**